

ABSTRAK

Fardi Tolangara, denan judul *“Kajian Tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara Di Daerah Provinsi Maluku Utara”* dibawah bimbingan Mahmud Hi. Umar dan Hidayatussalam.

Masalah dari judul skripsi ini. Untuk mengetahui bagai mana penerapan pasal 6 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986, oleh karna itulah skripsi ini mengkaji pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara di Dearah Provinsi Maluku Utara. Penulisan skripsi ini menggunakan metode normatif empiris yaitu penelitian hukum yang didasrkan pada gejala sosial sebagai fokus kajian (*law in access*) atau hukum yang dikonsepsikan dalam kehidupan sehari-hari dalam meniliti penerapan hukum, Gejala kehidupan masyarakat sebagai indikator dalam mengukur penerapan sebuah aturan hukum, suarat edaran Sekertaris Mahkamah Agung tentang Pembantuan Pengadilan Tingkat Pertama dilungkungan Mahkamah Agung sebagai peraturan pelaksana dari UU No. 5 tahun 1986.

Hasil penelitian skripsi ini memperoleh kesimpulan bahwa dalam hal pembentukan PTUN di Daerah Provinsi Maluku Utara dalam hal ini berdasarkan UU No. 5 tahun 1986, UU No. 4 Tahun 2004 dan Sekma No. 5 tahun 2019 telah memenuhi syarat pembentukan dan syarat prosedural hanya saja Pemerintahan Maluku Utara dalam hal ini belum intens melakukan dasakan dan kordinasi yang tak henti guna secepatnya dibentuk Pengadilan Tata Usaha Negara di Daerah Provinsi Maluku Utara.

Kata Kunci : *Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara, Access to Justice.*

The problem with the title of this thesis. To find out how the application of article 6 paragraph (1) of Law no. 5 of 1986, therefore this thesis examines the establishment of the State Administrative Court in the North Maluku Province. Writing this thesis uses empirical normative methods, namely legal research based on social phenomena as a focus of study (*law in access*) or laws that are conceptualized in everyday life in researching the application of law, Symptoms of community life as indicators in measuring the application of a rule of law, sound Circular of the Secretary of the Supreme Court regarding the Assistance of the First Level Court within the Supreme Court as the implementing regulation of Law no. 5 of 1986.

The results of this thesis research conclude that in terms of the formation of PTUN in the North Maluku Province, in this case based on Law no. 5 of 1986, Law no. 4 of 2004 and Sekma No. 5 of 2019 has fulfilled the requirements for the formation and procedural requirements, only the North Maluku Government in this case has not been intense in carrying out continuous insistence and coordination in order to immediately establish a State Administrative Court in the North Maluku Province.

Keywords: Establishment of State Administrative Court, Access to Justice.